



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hujurat**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**

Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama

Hujurat

NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasa Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.088 Unit
3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan	430 Unit
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,81 Hektar

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi 1
- Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
- Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara
- Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

PAGU APBN

Rp	610,426,000
Rp	15,488,099,000
Rp	16,995,002,000
Rp	14,435,535,000
Rp	47,529,062,000

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


FITRAN NUR

Jakarta, Agustus 2025
**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I**


HUJURAT



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hujurat**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**

Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama

Hujurat

NIP. 196811251999031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
		2	Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.079 Unit
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman Permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	497 Unit
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	18,81 Hektar

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I
- Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara
- Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara
- Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

PAGU APBN

Rp	610,426,000
Rp	15,469,687,000
Rp	16,420,364,000
Rp	10,302,871,000
Rp	42,803,348,000

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



FITRAH NUR

Jakarta, Desember 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I**



HUJURAT